



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN ASET DAERAH KOTA



LAPORAN **KINERJA** **TAHUN 2024**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

Jl. Jambi Kelurahan Rambung Barat

Kecamatan Binjai Selatan

Binjai

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan suatu sistem Pemerintahan yang baik termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaporkan hasil kinerjanya setiap tahun untuk dapat diketahui oleh publik.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kegiatan maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik, dengan menyusun Laporan Kinerja.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2024 yang memuat intisari atau materi pokok laporan informasi kerja, sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja yang menyangkut pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, dan aspek keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2024 kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan namun dengan kesungguhan dan keyakinan untuk mewujudkan instansi yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan untuk mendorong terciptanya

aparatur yang profesional dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai, kami akan berusaha memperbaikinya di masa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja ini dapat diterima sebagai pertanggungjawaban kinerja serta bahan peningkatan kinerja di masa mendatang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dan dapat dijadikan sebagai kajian guna ditindaklanjuti dan diperbaiki pada masa yang akan datang.

Binjai, Januari 2025



**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI**

**ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681210 198910 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 3

C. Kondisi BPKPD Kota Binjai 5

1. Susunan Organisasi 5

2. Tugas Pokok dan Fungsi 6

3. Sumber Daya Aparatur..... 8

D. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2024 20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Rencana Strategis 22

1. Pernyataan Visi 22

2. Pernyataan Misi..... 23

3. Tujuan Strategis 24

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 26

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 34

1. Kerangka Pengukuran Kinerja 34

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja BPKPAD Tahun2024..... 36

2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... 36

B. Analisis Sasaran Strategi..... 38

1. Meningkatnya KualitasTata Kelola Pemerintahan..... 38

2. Meningkatnya Sumber Sumber PAD..... 38

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan. Kinerja..... 42

4. Analisis/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja..... 42

a. Kegiatan..... 43

b. Realisasi Anggaran..... 44

BAB IV PENUTUP 49

A. Kesimpulan 49

B. Saran – Saran 50

Lampiran – 1 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Lampiran – 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam tata pemerintahan yang baik adalah azas akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai amanah dan mandat yang diterima. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai sebagai salah satu instansi penunjang tugas Walikota Binjai dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dituntut untuk lebih profesional, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di Kota Binjai.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai capaian sasaran dalam berbagai bidang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus menggambarkan tingkat capaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai berfungsi sebagai :

1. Bahan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.

2. Bahan evaluasi untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dan meningkatkan kinerja atas kegagalan ataupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kota Binjai demi mencapai sasaran utama yang telah ditetapkan diawal tahun. Hambatan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah belum berjalannya secara utuh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada : Perencanaan Kinerja yang terukur, Pengumpulan Data Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Data Kinerja. Data kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini dirangkum berdasarkan laporan dan data yang dihimpun dari berbagai sumber yang belum mempunyai sistem pengumpulan data kinerja yang memadai. Terhadap indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai akan dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang yaitu:

1. Diupayakannya agar setiap SKPD menyelesaikan SPJ dan laporan keuangan tepat pada waktunya.
2. Ditingkatkannya kinerja para aparatur dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai yang maksimal dengan meningkatkan disiplin PNS dalam bekerja.
3. Adanya keselarasan dalam pekerjaan dengan target yang akan dicapai.
4. Selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan program dan kegiatan.
5. Melakukan monitoring dan cek fisik langsung ke lapangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Deskripsi tersebut diharapkan mampu memberikan kriteria penilaian tersendiri terhadap keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota

Binjai khususnya dalam kompetisinya selaku organisasi yang membantu Walikota Binjai dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Binjai.

Binjai, Januari 2025



**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**

**ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681210 198910 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kota Binjai.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai sebagai salah satu instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dituntut untuk mewujudkan suatu instansi pemerintahan yang bersih, transparansi akuntabilitas dan berwibawa (*Clean Government and Good Governance*).

Perbaikan Pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Hal ini merupakan prasyarat bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan suatu sistem Pemerintahan yang baik termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaporkan hasil kinerjanya setiap tahun untuk dapat diketahui oleh publik. Pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan sistim pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistim

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik, Good Governance, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai (BPKPD) harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun dalam rangka mempertanggungjawabkan atau mengukur sejauh mana keberhasilan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/

dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/ laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja (LK) memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus.

Pertama : Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kedua : Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas penyampaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Kedua fungsi Laporan Kinerja (LK) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK).

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Inspektorat Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024 serta menjelaskan hal-hal yang belum berhasil dicapai.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan Internal Organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai. Dengan adanya Laporan Kinerja (LK) ini, manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Kondisi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai, dimana susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Fungsional Keuangan Kesekretariatan;
 - Fungsional Program Kesekretariatan.

3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

- Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
- Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung;
- Fungsional Keuangan Bid. Perbendaharaan.

4. Bidang Anggaran, terdiri dari :

- Sub Bidang Belanja Langsung;
- Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
- Fungsional Keuangan Bid. Anggaran.

5. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

- Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja;
- Fungsional Keuangan Bid. Akuntansi.

6. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

- Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB;
- Sub Bidang Penetapan PBB dan BPHTB;
- Fungsional Keuangan Bid. PBB dan BPHTB.

7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya terdiri dari :

- Sub Bidang Penetapan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- Sub Bidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- Fungsional Keuangan Bid. Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.

8. Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :

- Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
- Sub Bidang Optimalisasi Aset;
- Fungsional Keuangan Bid. Pengelolaan Aset Daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai diatur dalam Peraturan Walikota Binjai

Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah Kota Binjai. Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya (ekstensifikasi/intensifikasi);
- h. penyiapan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran tagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan Pajak daerah lainnya;
- i. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- k. pelaksanaan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- m. pengendalian pelaksanaan APBD;
- n. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- o. penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKPD Kota Binjai didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada Tahun 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil BPKPD Kota Binjai adalah sebanyak 87 orang. Jumlah dan komposisi pegawai BPKPD Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai BPKPD Kota Binjai Tahun 2024

No	Jabatan/Kepegawaian	Kondisi Saat Ini		
		Jlh	Pendidikan/Jurusan	Asal Sekolah
1	Kepala Badan	1	S2/ Studi Pembangunan	USU
2	Sekretaris	-	-	-
	- Perencana Ahli Muda	-	-	-
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	-	-
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1/Manajemen	UPMI Medan
	- Pelaksana	10	-	-
3	Kepala Bidang Perbendaharaan	1	S2/Akuntansi	USU
	- Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung	1	S1/Ilmu Pemerintahan	UMA

	- Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung	1	S1/Ekonomi	STIE Pelita Bangsa Binjai
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	S1/Manajemen	UNIMED
	- Pelaksana	11	-	-
4	Kepala Bidang Anggaran	1	S2/Manajemen	Univ. Pembangunan Panca Budi
	- Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung	1	S1/Teknik Industri	USU
	- Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung	1	S1/Manajemen	STIE Pelita Bangsa Binjai
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	-	-
	- Pelaksana	5	-	-
5	Kepala Bidang Akuntansi	1	S1/Akutansi	STIE Harapan Medan
	- Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja	1	S1/Akutansi	USU
	- Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja	1	S1/Ekonomi	UNIMED
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	S1/Akutansi	UMSU
	- Pelaksana	8	-	-
6	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	1	S1/Ilmu Hukum	UMA
	- Kepala Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB	1	S1/Teknik Industri	USU
	- Kepala Sub Bidang Penetapan PBB dan BPHTB	1	S1/Ilmu Pemerintahan	UMA
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	S1/Ilmu Hukum	Univ. St.Thomas Medan
	- Pelaksana	11	-	-
7	Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	S1/Manajemen	UMSU
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	S1/Ilmu Pemerintahan	UMA
	- Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah	1	DIII/Administrasi Perpajakan	USU

	Lainnya			
	- Kepala Sub Bidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	1	S1/Akutansi	Univ. HKBP Nomensen Medan
	- Pelaksana	8	-	-
8	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	1	S2/Manajemen	UISU
	- Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	1	S1/Ilmu Pemerintahan	Univ. Panca Budi Medan
	- Kepala Sub Bidang Optimalisasi Aset Daerah	1	DIII/Administrasi Perpajakan	USU
	- Penilai Pemerintah Ahli Muda	1	S1/Akutansi	USU
	- Pelaksana	7	-	-
	JUMLAH	87 Orang		

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPD Kota Binjai, 2024

Tabel 1.2
Data Pelaksana BPKPD Kota Binjai Tahun 2024

No	NAMA	Pendidikan/Jurusan	Asal Sekolah
	Sekretariat		
1	Yuanda DT. Majo Basa, S.T., M.M.	S2/Manajemen	Univ. Pembangunan Panca Budi
2	Iswan Yasri Nasution, S.E.	S1/Manajemen	STIE Pelita Bangsa Binjai
3	Syamsuddin, S.E.	S1/Manajemen	STIE Pelita Bangsa Binjai
4	Radhiyatul Hikmah, S.T.	S1/Teknik Industri	USU
5	Eliani, A.Md.	DIII/Manajemen Administrasi Perkantoran	ASMI Medan
6	Julianty Fitri, S.Sos.	S1/Ilmu Pemerintahan	UMA
7	Monarita	SMK/Bisnis Dan Manajemen	SMKN 1 Binjai
8	Sadimarsyuni, S.E.	S1/Manajemen	Univ. Panca Budi Medan
9	Dewi Fauziah Rahman, S.P.	S1/Sosial Ekonomi Pertanian	USU
10	Muhammad Junaidi, S.Sos	S1/Studi Pemerintahan	UMA
	Bidang Perbendaharaan		
1	Afriansyah Akbar, S.E.	S1/Manajemen	UMSU
2	Priyadi,S.E.	S1/Manajemen	Univ. Dharma Agung Medan
3	Eva Irawati, S.Sos.	S1/Ilmu Komunikasi	Univ. Dharma Agung Medan
4	Siska Maya Sari Karo-Karo Sinulingga, S.E.	S1/Manajemen	STIE Pelita Bangsa Binjai
5	Tri Rizky Lubis, S.Ak.	S1/Akuntansi	UMSU
6	Sandra Sukma Dewi, S.E.	S1/Ekonomi	UPI Padang
7	Hervina, S.E.	S1/Manajemen	USU
8	Ramlan	SMA/IPS	SMA Satria Binjai
9	Sudiono	SMEA/Akutansi	SMEAN Binjai
10	Suhendi	STM/Bangunan	STM Binjai
11	Irfan Subkhandi Putra	SMA/IPS	SMUN 1 Binjai

	Bidang Anggaran		
1	Yahya Ginting, S.E.	S1/Akutansi	UMA
2	Zulfina, S.E.	S1/Manajemen	USU+E17
3	Roy Johanes Sembiring, S.Kom.	S1/Teknik Informatika Komputer	STMIK Mikroskil Medan
4	Khairunnisa,S.E.	S1/Manajemen	UISU
5	Ahmadsyah	SMK/Otomotif	SMKN 2 Medan
	Bidang Akuntansi		
1	Sukirno, S.E.	S1/Manajemen	UISU
2	Duwi Purwati, S.E.	S1/Akutansi	UMSU
3	Melda Agustina Kaban, S.E.	S1/Akutansi	UNIMED
4	Malwi, S.E.	S1/Ilmu Manajemen	Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya Medan
5	Rizky Afrisha Samura, A.Md.	DIII/Teknik Komputer	Univ. Panca Budi Medan
6	Indra Muda Nasution	SMA/IPA	SMAN 1 Meulaboh Aceh
7	Herty Siagian,S.Ak.	S1/Akutansi Keuangan	UNPRI Medan
8	Julianti, S.E.	S1/Manajemen	Univ. Pelita Bangsa
	Bidang PBB dan BPHTB		
1	Winarti, S.Sos.	S1/Administrasi Negara	UMA
2	Mustika Sari, S.H.	S1/Ilmu Hukum	Univ. Panca Budi Medan
3	Muhammad Yazid	SMA/IPA	SMAN 3 Binjai
4	Ihsan Nasution, S.H.	S1/Ilmu Hukum	UISU
5	Maria Flora Jublina Sinaga, SE.	S1/Manajemen	Univ. Alwasliyah Labuhan Batu
6	Muhammad Fahru Batubara, A.Md.	D-III Teknik Mesin	Politeknik Negeri Medan
7	Afrizal	SMA/IPA	SMA Swasta Tunas Harapan Bahorok
8	Benny Prawira Tarigan	SMA/Elektronika	SMA Swasta Satria Binjai
9	Cindy Prasasti	SMU/IPS	SMU Swasta Harapan Medan
10	Agung Bhaskara Lubis, S.E.	S1/Manajemen	Univ. Harapan Medan

11	Afwita Hafni Pratiwi, A.Md.	DIII/Akutansi	Politeknik Negeri Medan
12	Thomas Parulian Derdo Haloho, S.E.	S1/Manajemen	Univ. Sumatera Utara
13	Millisa Aprilia	SMA/IPS	SMUN 1 Medan
Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya			
1	Novia Susanti,S.E	S1/Manajemen	UISU
2	Astika Dewinta Ginting, S.E.	S1/Ekonomi Akutansi	Univ. HKBP Nomensen Medan
3	Jaya, S.E.	S1/Manajemen	STIE Pelita Bangsa Binjai
4	Argenta Bangun	SMK/Akutansi	SMK Swasta Swakarya Binjai
5	Parlindungan Nasution	SMA/IPA	SMAN 3 Binjai
6	Kurniawan Rizaldi	Paket C / IPS	PKBM Asuhan Ayah Bunda Binjai
7	Khaidir, S.H.	S1/Ilmu Hukum	STIH Graha Kirana, Medan
8	Irwansyah Sebayang	SMK/Akutansi	SMK Teladan, Binjai
Bidang Pengelolaan Aset Daerah			
1	Nikmah Ramadhani Pulungan, A.Md.Ak.	DIII/Akuntansi	Politeknik USU,Medan
2	Rini Widyastuti, S.E.	S1/Manajemen	STIE Pelita Bangsa, Binjai
3	Indra Gunawan, S.M.	S1/Manajemen	Univ. Pembangunan Panca Budi, Medan
4	Hari Rahmadani, S.H.	S1/Hukum	Univ. Tjut Nyak Dhien, Medan
5	Ismail	SMA/IPA	SMA Persiapan, Stabat
6	Lasri Bakkara, S.E.	S1/Manajemen	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan
7	Rahmadan Syah, S.T., M.Tr.AP	S2/Administrasi Pemerintahan	STIA LAN RI
JUMLAH		62 Orang	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPD Kota Binjai, 2024

Tabel 1.3

PNS BPKPD Kota Binjai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	67
3	Golongan II	12
4	Golongan I	-
Jumlah		87

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPD Kota Binjai, 2024

Tabel 1.4.

PNS BPKPD Kota Binjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	6
2	Sarjana (S1)	58
3	Akademi/D3	7
4	SLTA	16
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		87

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPD Kota Binjai, 2024

Tenaga Honorer sebanyak 101 orang berpendidikan SLTA, D3, S1, dan S2. Jumlah Tenaga Honorer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dapat terlihat pada Tabel 1.5. berikut :

Tabel 1.5
Data Honorer BPKPD Kota Binjai Tahun 2024

No	N A M A	PENDIDIKAN	PETUGAS
1. SEKRETARIAT			
1	IPAN SYAHPUTRA	SMA IPS	Administrasi
2	SRI REZKI MUHARIANI	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Administrasi
3	ABDUL HAFIZ KELIAT	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	Administrasi
4	INTAN FADHILAH LUBIS	MAN Agama	Administrasi
5	FADHLAN MUHAMMAD NASUTION	S1 Fisika	Administrasi
6	M. IQBAL, S.KOM.	S1 Teknik Informatika	Administrasi
7	MUHAMMAD BUKHORI NASUTION	SMK Akuntansi	Administrasi
8	HARDIANSYAH	SMA Informatika Komputer	Tenaga Informasi & Teknologi
9	AMRI	Sekolah Teknik	Teknisi Listrik
10	YUSMAYANTI	SMA	Petugas Kebersihan
11	RINI SUSANTI	SD	Petugas Kebersihan
12	TEDDI GUNAWAN	SMP	Petugas Kebersihan
13	NENG SRI CHAIRIAH	SMA	Petugas Kebersihan
14	ERMA CHROSMAWATI	SMK	Petugas Kebersihan
15	RAHMAINI	SMP	Petugas Kebersihan
16	SEPRIANI WULANDARI BR PINEM	SMA IPA	Petugas Kebersihan
17	SUTRIADI	SMA	Petugas Keamanan
18	SUGIARDI	SMEA Akuntansi	Petugas Keamanan
2. BIDANG PERBENDAHARAAN			
1	SITI SABARIAH, SH	S1 Hukum	Administrasi
2	NURBAYANA, SE	S1 Manajemen	Administrasi
3	MIZUAR HAJIJI	SMK Audio Video	Administrasi
4	TARUNA SYAHPUTRA TARIGAN	SMA IPA	Administrasi
3. BIDANG ANGGARAN			
1	DHITA TARI FAFIOLA	S2 Manajemen	Administrasi
4. BIDANG AKUNTANSI			
1	REZA CHAIRUL AKBAR	S1 Ekonomi	Administrasi
2	FERRA ANITA PRATIWI	S1 Manajemen	Administrasi
5. BIDANG PBB DAN BPHTB			
1	ANDI ALEXANDER GINTING	SMA IPA	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
2	DIMAS AJI UMARSENIO	SMK Otomotif	Petugas Lapangan PBB & BPHTB

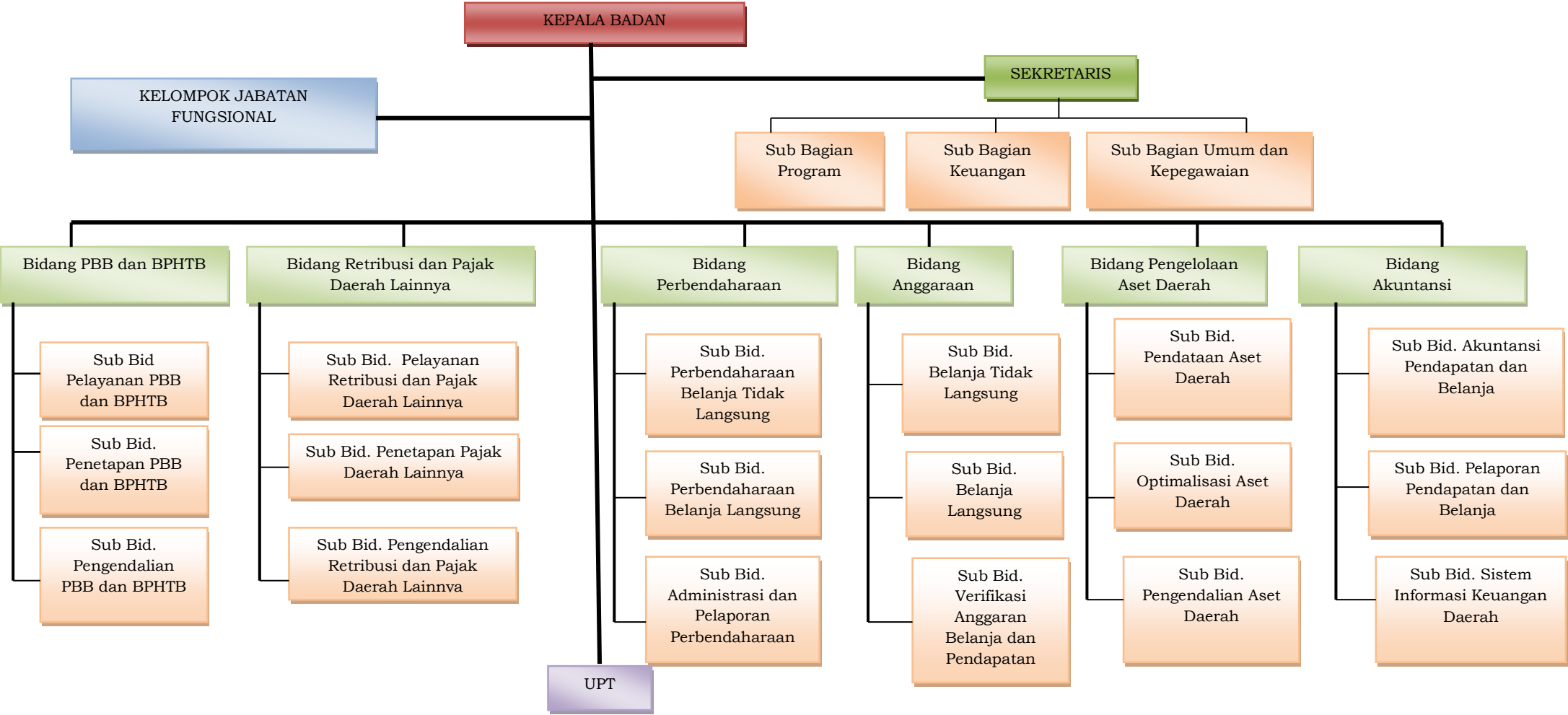
3	MUHAMMAD KHOLIL HARAHAAP	S1 Filsafat Politik Islam	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
4	MEILINDA	SMEA Perkantoran	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
5	SELLA PRATIWI	SMK Teknik Komputer dan Jaringan	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
6	M. ALFIRDAUS HASIBUAN	S1 Teknik Komputer	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
7	JOHARI GIRSANG	SMA IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
8	NUR AZIZAH NASUTION	S1 Ilmu Komunikasi	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
9	M. IKHSAN AM	SMA IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
10	RAODAH	SMA	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
11	FERRY SYARIFFUDIN LUBIS	SMU IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
12	RAHMAT HIDAYAT	SMA IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
13	AGUS PRATAMA	SMK Teknik Mesin	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
14	DEVI MANDA SARI	SMA IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
15	SRI ASIH WAHYUNI	SMA BIO A2 (IPA)	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
16	NUR AISYIYAH	S1 Sistem Informasi	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
17	PARMONO	SMA IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
18	IMA	SMK Pemasaran	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
19	FERNANDES	SMA IPA	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
20	SRI WAHYUNI NASUTION	SMK Akuntansi	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
21	DESI ARYANI NASUTION	MAN IPA	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
22	WAHYUDI INDRAWAN	S1 Ekonomi	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
23	DESI SYAHPITRI	MAN IPA	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
24	WILLY DESFRIZAL	SMK Otomotif	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
25	SRI WAHYUNI LUBIS	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
26	IRVAN TARIGAN, A.Md	D.III Administrasi Perpajakan	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
27	EDWARDSYAH	SMA A1 (Fisika)	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
28	USMAN ZULKARNAIN	S1 Hukum	Petugas Lapangan PBB & BPHTB

29	EFLI ERDHI YANTI HARAHAP	SMK Akuntansi	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
30	AYU APRILIA	MAN IPA	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
31	CINTIA STEPANI BR BANGUN, A.Md.	D. III Administrasi Bisnis	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
32	M. HAFIZH LUTHFY PRAYOGA	SMA MIPA	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
33	WENDI MAIMOND, SH	S1 Hukum	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
34	CINDY PRATIWI	SMA IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
35	ALIKHA NATASYA	SMA IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
36	LAILA FADHILAH LUBIS	S1 Perbankan Syariah	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
37	DAVID SETIADI SIDABALOK, A.Md.	D. III Teknik Mesin	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
38	MAULIDA OCTAVIANI, SE	S1 Perbankan Syariah	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
39	SYAFA AZZAHRA	MAN IPA	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
40	RICKY GONZALES KARO SEKALI	SMA IPS	Petugas Lapangan PBB & BPHTB
41	INDAH SRI REZEKI	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah	Pelayanan PBB & BPHTB
42	LILIA RIANDA OTHARY SIREGAR	SMA IPA	Pelayanan PBB & BPHTB
43	YENNI SYAHFITRI LUBIS	SMK Akuntansi	Operator Komputer
44	ASTI IKA PUTRI	SMA IPA	Operator Komputer
45	DELVIRA SALSABILA	S1 Sistem Informatika	Operator Komputer
46	EMA SUSANTI	SMEA Perkantoran	Administrasi
47	ASRIYANI LESTARI DAULAY	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Administrasi
6. BIDANG RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH LAINNYA			
1	RIZKI IKHSAN SYAHPUTRA	SMK Teknik Otomotif	Petugas Lapangan Pajak Daerah
2	PUTRA PRATAMA SITANGGANG	SMA IPS	Petugas Lapangan Pajak Daerah
3	AGUS SETIAWAN	S1 Perbankan Syariah	Petugas Lapangan Pajak Daerah
4	SEHMA PUTRA BANGUN	S1 Hukum	Petugas Lapangan Pajak Daerah
5	EDY SYAHPUTRA	SMA IPA	Petugas Lapangan Pajak Daerah
6	CHANDRA SUNIARDI	D. II Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Pelabuhan	Petugas Lapangan Pajak Daerah
7	REZA RENALDY	SMA IPS	Petugas Lapangan Pajak Daerah

8	MEISYA AISYAH SURBAKTI	SMA IPA	Petugas Lapangan Pajak Daerah
9	ANITA	SMK Teknik Komputer dan Jaringan	Petugas Lapangan Pajak Daerah
10	MUHAMMAD AL-HAFIZ SIRAIT	S1 Pendidikan Matematika	Petugas Lapangan Pajak Daerah
11	PUTRI AYU REGITA	SMK Tata Busana	Petugas Lapangan Pajak Daerah
12	GINTING, NINKA RANINDA	SMA IPA	Petugas Lapangan Pajak Daerah
13	ADINDA RIZKI RAMADHANA MATONDANG	MAN IPA	Petugas Lapangan Pajak Daerah
14	WIDIYAWATI, AM.Keb	D. III Kebidanan	Petugas Lapangan Pajak Daerah
15	ANDREW FACHRIZA	S1 Ekonomi	Petugas Penertiban Pajak
16	RAJA MUDA NASUTION	SMA IPS	Petugas Penertiban Pajak
17	ANDRIAN DILY GINTING	S1 Ekonomi	Petugas Penertiban Pajak
18	MUHAMMAD ADMAJA	SMA IPA	Petugas Penertiban Pajak
19	MUHAMMAD IRFANDI	SMK Teknik Bangunan	Petugas Penertiban Pajak
20	SITI NADILA	SMA	Administrasi
21	MUGTAFILLAH. RM	S2 Akuntansi	Operator Komputer
22	VITA SYLVIA SURBAKTI	S1 Teknik Informatika	Operator Komputer
23	AMALIA	SMA IPS	Operator Komputer
24	ROKAYAH	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Operator Komputer
25	TANIA AUDINA	SMK Administrasi Perkantoran	Operator Komputer
26	MUHAMMAD ADENIN	SMA IPA	Operator Komputer
27	GITA PRATIWI	SMA IPS	Operator Komputer
28	CINDI AGUSTINI	SMA IPA	Operator Komputer
7. BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH			
1	ADELIA PUTRI ANGGRAINI	SMK IPS	Administrasi
2	PUTRI ARISANDI BR. SILALAH	SMK Akuntansi dan Keuangan	Administrasi
3	YUNITA PRATIWI	SMA	Administrasi
JUMLAH SELURUH STAF HONORER			103

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPD Kota Binjai, 2024

Gambar 1.5.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai



Dilihat dari segi beban kerjanya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai telah cukup memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Namun demikian masih sangat perlu membekali SDM dengan berbagai pelatihan struktural maupun teknis fungsional. Hal ini perlu agar tercipta keseimbangan antara personil yang berkualifikasi pendidikan dengan tuntutan tugas yang diemban.

Dalam hal sarana dan prasarana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai belum dapat dikatakan representatif. Hal ini dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang belum memadai maupun fasilitas-fasilitas lainnya seperti kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

D. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2024

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Result*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Capaian Kinerja**
- B. Analisis Capaian Kinerja**
- C. Akuntabilitas Keuangan**
- D. Perbandingan Pendapatan Daerah Terhadap PAD**

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dengan instansi terkait lainnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Dalam rangka mencerminkan apa yang diinginkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dan sebagai arah dan fokus organisasi yang diharapkan serta menumbuhkan komitmen bagi seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai secara berkesinambungan, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai adalah :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN TERLAKSANANYA TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA BINJAI.”

2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisis standar belanja.
3. Trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
4. Peningkatan tertib administrasi aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pengelolaan pajak dan rertribusi daerah.

3. Tujuan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi dan Misi organisasi. Di dalamnya juga terdapat sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2024 telah menyusun 4 (empat) program kerja, 12 (Dua belas) kegiatan, dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yang semuanya menitikberatkan pada 1 (satu) tujuan strategis yang ingin dicapai, yaitu :

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit LKPJ oleh BPK RI “

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode Tahun Anggaran 2024. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Program Kerja

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM	
1.	Meningkatkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2	Meningkatkan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pelaporan kinerja		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel				
4	Optimalnya pengelolaan aset daerah		Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	Optimalnya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Dengan ditetapkanya tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai maka untuk memudahkan mencapai tujuan tersebut, harus terlebih dahulu diturunkan menjadi beberapa sasaran sehingga diharapkan dengan tercapainya sasaran yang telah disusun dengan sendirinya akan mendorong tercapainya tujuan tersebut.

Adapun capaian yang dimaksud ditampilkan dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	90 %
2.	Sistem Akuntabilitas melalui integritas sistem perencanaan sistem penganggaran dan pelaporan kinerja belum ditingkatkan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Menurunnya SILPA terhadap APBD	0.016 %
3.	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah	Opini BPK	WTP
4.	Optimalnya pengelolaan aset daerah	Meningkatnya sumber sumber pendapatan asli daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	4.00 %
5	Optimalnya penggalian potensi sumber sumber pendapatan daerah	Meningkatnya sumber sumber pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap APBD Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	19.50 % 5.00 %

Cara perhitungan untuk masing masing persentase dari indikator kinerja
ditampilkan dengan rumus sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN		
Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran	X	100%
Menurunnya SILPA terhadap APBD	SILPA / APBD	X	100%
Opini BPK	Penilaian BPK RI atas audit LKPJ Pemerintah Daerah		
Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan / Realisasi PAD	X	100%
Persentase PAD terhadap APBD	Realisasi PAD / Realisasi APBD	X	100%
Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	(Realisasi Pajak 2024 + Retribusi Daerah 2024) - (Realisasi Pajak 2023 + Retribusi Daerah 2023) / (Realisasi Pjk Daerah 2023 + Retribusi Daerah Thn 2023)	X	100%

Pada tahun 2024 telah menggunakan/menerapkan aplikasi keuangan SIPD (Sistim Informasi Pembangunan Daerah) yaitu suatu sistim yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Untuk Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai telah menyusun 4 (empat) program kerja dan 12 (Dua belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 2.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
- 3.6 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- 4.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 4.2 Pengadaan Mebel
- 4.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 2.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2.2 Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 2.3 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 2.4 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait
- 2.5 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 3.1 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.3 Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.1 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

III. Program Pengelolaan Barang Milik daerah

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.1. Penyusunan Standar Harga

1.2. Penilaian Barang Milik Daerah

1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

1.4. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

1.6. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

1.7. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.1 Penyuluhan dan Perluasan Kebijakan Pajak Daerah

1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

1.3 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

1.4 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

1.5 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1.6 Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah

1.7 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

1.8 Penagihan Pajak Daerah

1.9 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan atau mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga tidak ada kegiatan yang tidak tepat sasaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, setiap tahun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai berusaha untuk memaksimalkan seluruh kemampuannya dalam mengelola keuangan dan asset daerah dengan baik. Renstra sebagai dasar dalam mencapai tujuan strategis organisasi telah memuat sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun berikutnya. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 disusun suatu Rencana Tahunan (*Annual Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Tahunan tersebut dimulai dengan penetapan kinerja yang dimuat ke dalam Rencana Kerja setiap tahunnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai terus berusaha memperbaiki diri dalam mengelola keuangan dan asset daerah Kota Binjai menuju ke arah yang lebih baik, pengelolaan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKPAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	90 %
		Persentase SILPA terhadap APBD	0.016 %
		Opini BPK	WTP
2.	Meningkatnya sumber sumber pendapatan asli daerah	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	4.00 %
		Persentase PAD terhadap APBD	19.50%
		Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5.00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kota	Rp. 21.151.502.181,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 27.666.328.399,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 749.998.848,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.799.992.771,-	APBD
	Jumlah	Rp. 54.367.822.199,-	

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai menyusun LAKIP BPKPD Kota Binjai Tahun 2024 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Binjai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 maupun Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2024.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan

pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024

2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.1.1. Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas.	90 %	96,50%
		1.1.2. Persentase SILPA terhadap APBD	0.016%	1,22 %
		1.1.3. Opini BPK	WTP	-
2.	2.1.Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	2.1.1 Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	4.00%	3,60 %
		2.1.2 Persentase PAD terhadap APBD	19.50%	12,14 %
		2.1.3 Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5.00%	0,45 %

Penjelasan perhitungan nilai Indikator Kinerja Utama dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

- Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas dihitung dengan rumusan:

Realisasi Anggaran x 100 %

Alokasi Anggaran

= $\frac{\text{Rp. 24.860.371.975,82}}{\text{Rp. 25.755.134.212,00}}$ x 100%

= 96,50 %

- Persentase SILPA terhadap APBD dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)}}{\text{APBD}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 11.809.810.815,24}}{\text{Rp. 1.063.368.587.539,25}} \times 100\%$$

$$= 1,22 \%$$

- Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 4.307.670.614,30}}{\text{Rp. 117.434.777.804,56}} \times 100\%$$

$$= 3,60 \%$$

- Persentase PAD terhadap APBD dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi APBD}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 117.434.777.804,56}}{\text{Rp. 967.174.658.000,56}} \times 100\%$$

$$= 12,14 \%$$

- Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah dihitung dengan rumusan:

$$\frac{(\text{Realisasi Pajak 2024} + \text{Retribusi Daerah 2024}) - (\text{Realisasi Pajak 2023} + \text{Retribusi Daerah 2023})}{(\text{Realisasi Pajak 2023} + \text{Retribusi Daerah 2023})} \times 100\%$$

$$= \frac{(\text{Rp. 75.050.422.935,00} + \text{Rp. 5.163.648.714,00}) - (\text{Rp. 72.523.266.925,24} + \text{Rp. 5.336.495.748,00})}{(\text{Rp. 72.523.266.925,24} + \text{Rp. 5.336.495.748,00})} \times 100\%$$

$$= 0,45 \%$$

“Sumber Data:” LRA Konsolidasi Sementara per 9 Februari 2025 (Bidang Akuntansi BPKPD Kota Binjai)

B. Analisis Sasaran Strategi

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan :

Capaian indikator kinerja sasaran untuk :

- ❖ Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar 90% dan yang terealisasi sebesar 96,50 %, sehingga capaian indikator kinerjanya adalah sangat tinggi dengan besaran 107,2%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan semaksimalnya dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- ❖ Persentase SILPA terhadap APBD untuk tahun anggaran 2024 adalah 0.016% dan terealisasi 1,22%, sehingga capaian indikator kinerjanya adalah sangat rendah dengan besaran -98,79%, Nilai SILPA ini masih belum final karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih dalam proses finalisasi untuk selanjutnya akan diaudit oleh BPK-RI, sehingga besarannya masih sangat dimungkinkan akan mengalami penurunan yang signifikan. Besaran SILPA disebabkan karena adanya kegiatan yang telah disediakan dananya (terbit SPD) namun tidak terealisasi maksimal diakhir tahun anggaran.
- ❖ Target Opini BPK adalah WTP dan diharapkan tercapai adalah WTP juga namun data yang disajikan ini khusus untuk realisasi Opini BPK Tahun Anggaran 2023 yang diperoleh adalah WTP, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024 belum ada opini karena belum dilaksanakan audit Laporan Keuangan Pemda oleh BPK.

2. Meningkatnya Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah:

- ❖ Target Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD adalah sebesar 4.00% dan terealisasi sebesar 3,60%, target tidak tercapai karena capaian indikator kinerjanya adalah sebesar 90,00%, namun termasuk kategori capaian tinggi,
- ❖ Target Persentase PAD terhadap APBD adalah sebesar 19.50%, adapun yang terealisasi sebesar 12,14%, capaian indikator kinerjanya sebesar 62,25%, termasuk kategori capaian rendah, hal ini disebabkan pada saat Laporan Kinerja ini disusun realisasi dana BLUD belum diinput OPD terkait pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga besarannya masih sangat dimungkinkan akan mengalami peningkatan yang signifikan setelah di audit oleh BPK-RI.

- ❖ Target Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah adalah sebesar 5.00% dan terealisasi sebesar 0,45% dan capaian indikator kerja sebesar 9,00% dan termasuk sangat rendah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban pajak dan retribusi pajak daerah serta menurunnya laju pertumbuhan ekonomi padan Tahun 2024.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai menunjukkan bahwa indikator kinerja telah terlaksana meskipun ada beberapa yang capaiannya rendah disebabkan faktor internal dan eksternal.

Dalam Perencanaan Kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen lainnya.

Dalam pengukuran kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja.

Dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Pemanfaatan IT dalam SAKIP menuntut peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur se-Kota Binjai, Kapasitas SDM Aparatur pada OPD yang menjadi *Leading Sector* utama SAKIP (Setda, Bappeda, Dinas BPKAD dan Inspektorat) serta unit kerja Sekretariat pada tiap OPD perlu ditingkatkan.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian %	Kriteria
			Target	Realisasi		
1.	2.	3.				

1.	1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.1.1.	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas.	90.00	96.50	107.2	SANGAT TINGGI
		2.1.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	0.016	1.22	-98,79%	SANGAT RENDAH
		2.1.3.	Opini BPK	WTP	-	-	-
2.	2.1.Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	2.1.4	Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	4.00	3.60	90.00	TINGGI
		2.1.5	Persentase PAD terhadap APBD	19.50	12.14	62.25	RENDAH
		2.1.6	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5.00	0.45	9.00	SANGAT RENDAH

Perbandingan Realisasi dan Target Renstra BPKPAD Kota Binjai

Tabel 3.4
Realisasi dan Target Renstra BPKPAD

No .	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Realisasi 2024	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas.	96.50	80	85	90	95	100
		2. Persentase SILPA terhadap APBD	1.22	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014
		3. Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	1. Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	3.60	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
		2. Persentase PAD terhadap APBD	12.14	19.00	19.25	19.50	19.75	20.00
		3. Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	0.45	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

3.2.2.1 Kendala / Hambatan dalam Pencapaian Target.

Kendala/ Hambatan yang dihadapi dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai belum diputuskan saat penyusunan Laporan Kinerja ini
2. Laporan Realisasi Anggaran APBD TA 2024 belum final dan masih Un Audited.
3. Terlambatnya OPD yang terkait menginput laporan dana BLUD sehingga total realisasi PAD masih rendah.
4. Belum meningkatnya kesadaran masyarakat membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2.2.2 Solusi / Harapan dalam Pencapaian Target.

Solusi / Harapan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai agar tercapai target Sasaran Strategis, perlu dilakukan beberapa kebijakan yang akan diterapkan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan penyusun laporan keuangan OPD agar tepat waktu dan akurat dalam penyampaian laporan keuangan
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dan penyusunan anggaran, penatausahaan hingga pelaporan keuangan.
3. Meningkatkan capaian Pajak dan Retribusi Daerah dengan sosialisasi ke masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Binjai dalam pemungutan tunggakan Pajak dan Retribusi daerah.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Analisis/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dapat tercapai karena didukung dengan Program Penunjang

urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah , Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

a. Kegiatan

Kegiatan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah: administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Kegiatan untuk mendukung Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan untuk mendukung Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah: Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan untuk mendukung Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

Pada Tabel dibawah ini dapat diuraikan Anggaran dan Realisasi yang digunakan pada 4 (empat) Program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai untuk mewujudkan Sasaran Strategi, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.472.789.020	Rp 15.994.102.553	97.09%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 3.289.855.466	Rp. 2.953.680.367	89.78%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 749.997.709	Rp. 720.016.138	96.00%

4		Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	-
	2	Pengadaan mebel	-	-	-
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.562.070,00	705.614.943,00	86,20%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	236.728.000,00	230.382.468,00	97,32%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.060.376,00	325.731.675,00	77,18%
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.773.694,00	149.500.800,00	93,57%
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.170.900,00	671.952.346,82	97,64%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.328.000,00	108.287.415,00	95,55%
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	64.100.000,00	63.466.000,00	99,01%
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.800.000,00	198.695.377,40	99,45%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.942.900,00	301.503.554,42	96,96%
2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.289.855.465,95	2.953.280.367,00	89,78%
1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.161.118.779,00	1.095.569.343,00	94,35%
	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	131.625.085,00	124.928.000,00	94,91%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	130.501.040,00	125.660.000,00	96,29%

	3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	460.737.895,00	431.960.300,00	93,75%
	4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	438.254.759,00	413.021.043,00	94,24%
2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	905.802.316,00	864.711.871,00	95,46%
	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	204.527.246,00	180.019.000,00	88,02%
	2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	121.800.670,00	120.764.834,00	99,15%
	3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	307.272.000,00	301.158.744,00	98,01%
	4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	35.820.950,00	34.915.449,00	97,47%
	5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	236.381.450,00	227.853.844,00	96,39%
3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	799.299.545,00	793.399.153,00	99,26%
	1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	232.287.899,00	231.897.403,00	99,83%
	2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	295.894.514,00	294.792.790,00	99,63%
	3	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	271.117.132,00	266.708.960,00	98,37%

4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	423.634.825,95	200.000.000,00	47,21%
	1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	423.634.825,95	200.000.000,00	47,21%
	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	749.997.708,70	720.016.138,00	96,00%
1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	749.997.708,70	720.016.138,00	96,00%
	1	Penyusunan Standar Harga	219.999.740,00	218.361.073,00	99,26%
	2	PenatausahaanBarang Milik Daerah	174.999.150,90	171.664.400,00	98,09%
	3	Penilaian Barang Milik Daerah	49.999.507,00	48.247.400,00	96,50%
	4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	69.999.757,80	68.305.200,00	97,58%
	5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	49.999.970,00	46.272.800,00	92,55%
	6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	134.999.733,00	127.314.840,00	94,31%
	7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	49.999.850,00	39.850.425,00	79,70%
	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.242.492.017,53	5.192.572.918,00	99,05%
1		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.242.492.017,53	5.192.572.918,00	99,05%
	1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	290.315.965,68	290.045.460,00	99,91%
	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	592.025.024,95	586.572.100,00	99,08%
	3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	282.398.410,00	281.077.600,00	99,53%
	4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	560.127.200,00	559.749.800,00	99,93%
	5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	937.674.515,00	929.296.385,00	99,11%

	6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	958.092.508,90	925.778.633,00	96,63%
	7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	391.726.590,00	390.576.940,00	99,71%
	8	Penagihan Pajak Daerah	570.933.155,00	570.535.200,00	99,93%
	9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	659.198.648,00	658.940.800,00	99,96%
Jumlah Belanja			25.755.134.212,25	24.860.371.975,82	96,50 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturann Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai melakukan perbaikan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Binjai.

B. Saran-saran

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Setiap OPD menyelesaikan SPJ dan laporan keuangan tepat waktu.
2. Meningkatnya kinerja aparatur dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang maksimal dengan meningkatkan disiplin PNS dalam bekerja.
3. Adanya keselarasan dalam pekerjaan dengan target yang akan dicapai.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan program dan kegiatan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Demikian Laporan Kinerja ini kami susun dan semoga bermanfaat bagi kita semua.



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

Jalan Jambi – Kel. Rambung Barat - Binjai 20723

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 100.3.3/10/PTPAO/1/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2024

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standarisasi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah , perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Daerah ...

6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Sasaran yang terdapat pada Dokumen Rencana Strategis yang dapat di tetapkan targetnya.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 10 Januari 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI



ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681210 198910 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

1. Nama Unit Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI
2. Tugas :
 1. Aspek administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah;
 - b. Pengkajian kebutuhan daerah;
 - c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dibidang pendapatan dan belanja daerah;
 - e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
 - f. Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah.
 2. Aspek Pendapatan Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Melaksanakan perumusan dan kebijakan eknis Pemerintah Daerah di bidang pendapatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang pendapatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
 3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah, tugasnya meliputi:
 - a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah;

- b. Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah;
- d. Penyusunan database aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Binjai;
- e. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

3. Fungsi

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. Melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, pendapatan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya;
- g. Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya (ekstensifikasi/intensifikasi);
- h. Menyiapkan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran penagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- k. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Melakukan pengujian atas penagihan dan memerintahkan pembayaran;
- m. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- n. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- o. Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Penghitungan IKU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas 2. Persentase SILPA terhadap APBD 3. Opini BPK	Kepala BPKPAD	Laporan Realisasi Keuangan LRA Pemko 1. Laporan Keuangan Pemko 2. Laporan BMD 3. APBD Kota Binjai	Realisasi Belanja Sekretariat / Pagu Belanja Sekretariat SILPA / APBD Hasil Penilaian BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai
2	Meningkatnya sumber sumber pendapatan asli daerah	1. Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD 2. Persentase PAD terhadap APBD	Kepala BPKPAD	1. Laporan BMD 2. LRA Pemko 1. LRA Pemko 2. APBD Kota Binjai	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan / Realisasi PAD Realisasi PAD / Realisasi APBD

		3. Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah		LRA Pemko	(Realisasi Pajak 2023 + Retribusi Daerah 2023) – (Realisasi Pajak 2022 + Retribusi Daerah 2022) / (Realisasi Pajak 2022 + Retribusi Daerah 2022)
--	--	---	--	-----------	--

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681210 198910 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan Akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP**
Jabatan : **WALI KOTA BINJAI**

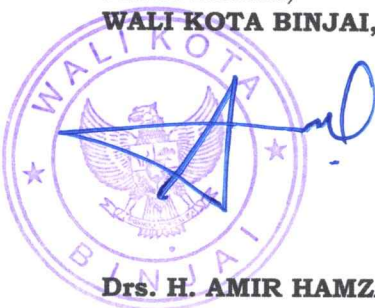
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai Lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA BINJAI,



Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KOTA BINJAI**



**ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681210 198910 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	90%
		Persentase SILPA terhadap APBD	0,016%
		Opini BPK	WTP
2.	Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah	Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	4,00%
		Persentase PAD terhadap APBD	19,50%
		Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 21.151.502.181,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 27.666.328.399,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 749.998.848,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.799.992.771,-	APBD
	Jumlah	Rp. 54.367.822.199,-	

Binjai,

2024

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KOTA BINJAI



ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681210 198910 1 001

Pihak Kedua,

WALI KOTA BINJAI,



Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir, IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M.**
Jabatan : **Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai**

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

**Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**

Ir. IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M.
NIP. 19661021 199402 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 18.048.737.588,00	APBD
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 17.508.977.588,00	APBD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp 539.760.000,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 99.378.000,00	APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 99.378.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.635.888.935,00	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 47.852.933,00	APBD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 405.963.440,00	APBD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 412.893.082,00	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 148.847.500,00	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp 28.800.000,00	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 49.076.980,00	APBD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 542.455.000,00	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 699.072.358,00	APBD
	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 225.928.000	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 313.370.664	APBD
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 159.773.694	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 668.425.300,00	APBD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional/lapangan	Rp 113.328.000	APBD
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 64.100.000	APBD
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 199.800.000	APBD
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 291.197.300	APBD
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 204.527.246,00	APBD
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 204.527.246	APBD
	Jumlah	Rp 21.356.029.427	

Binjai, Januari 2024

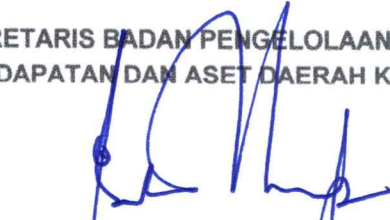
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Binjai, Januari 2024

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



Ir.IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M
NIP. 19661021 199402 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISWAN YASRI NASUTION, S.E.**
Jabatan : **Plt. Kasubbag. Keuangan**
Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **Ir, IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M.**
Jabatan : **Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai**

**Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag. Keuangan Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai**

Ir. IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M.
NIP. 19661021 199402 1 002

ISWAN YASRI NASUTION, S.E.
NIP. 19701010 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

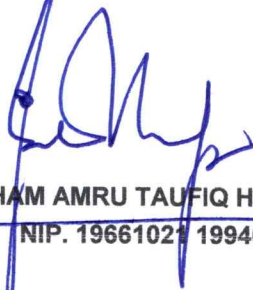
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 18.048.737.588,00	APBD
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 17.508.977.588,00	APBD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp 539.760.000,00	APBD
Jumlah		Rp 18.048.737.588,00	

Binjai, Januari 2024

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI


Ir.IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M.
NIP. 19661021 199402 1 002

Binjai, Januari 2024

PLT. KASUBBAG.KEUANGAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI


ISWAN YASRI NASUTION, S.E.
NIP. 19701010 200502 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTI ZENIARTI, S.E.**
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

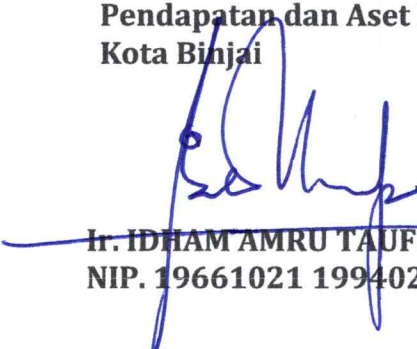
Nama : **Ir, IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAAP, M.M.**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai


Ir. IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAAP, M.M
NIP. 19661021 199402 1 002

Pihak Pertama,
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai


GUSTI ZENIARTI, S.E.
NIP. 19700817 199602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

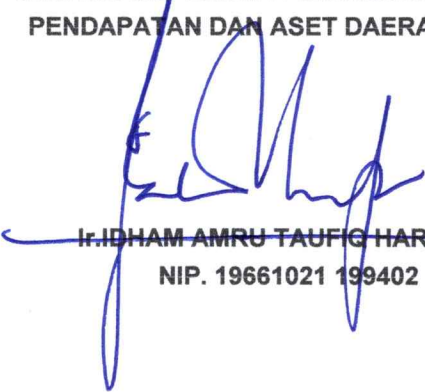
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 99.378.000,00	APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 99.378.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.635.888.935,00	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 47.852.933,00	APBD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 405.963.440,00	APBD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 412.893.082,00	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 148.847.500,00	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp 28.800.000,00	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 49.076.980,00	APBD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 542.455.000,00	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 699.072.358,00	APBD
	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 225.928.000	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 313.370.664	APBD
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 159.773.694	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 668.425.300,00	APBD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional/lapangan	Rp 113.328.000	APBD
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 64.100.000	APBD
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 199.800.000	APBD
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 291.197.300	APBD
Jumlah		Rp 3.102.764.593	

Binjai, Januari 2024

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI


Ir. IDHAM AMRU TAUFIC HARAHAP, M.M.
NIP. 19661021 199402 1 002

Binjai, Januari 2024

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI


GUSTI ZENIARTI, S.E.
NIP. 19700817 199602 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUANDA DT. MAJO BASA, ST**
Jabatan : **Plt. Kasubbag. Program**
Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

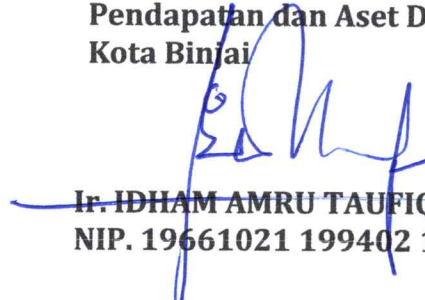
Nama : **Ir, IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M.**
Jabatan : **Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

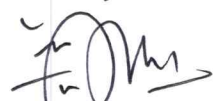
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai


Ir. IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M.
NIP. 19661021 199402 1 002

Pihak Pertama,
Plt. Kasubbag. Program Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai


YUANDA DT. MAJO BASA, ST
NIP. 19790626 200502 1 001

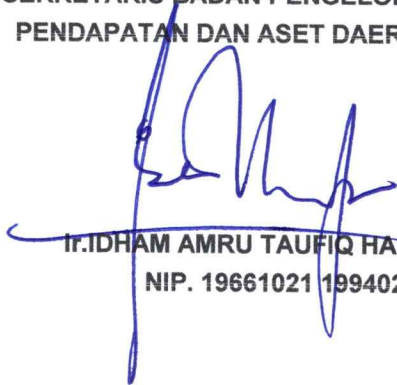
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 204.527.246,00	APBD
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 204.527.246,00	APBD
Jumlah		Rp 204.527.246,00	

Binjai, Januari 2024

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI


IF.IDHAM AMRU TAUFIQ HARAHAHAP, M.M.
NIP. 19661021 199402 1 002

Binjai, Januari 2024

PLT. KASUBBAG.PROGRAM BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI


YUANDA DT. MAJO BASA, ST
NIP. 19790626 200502 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NADRATUL FIRDA, S.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai

NADRATUL FIRDA, SH
NIP. 19820518 200502 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	100%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 1.061.212.579	APBD
	a. Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Rp 131.625.085	APBD
	b. Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Rp 130.501.040	APBD
	c. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Rp 357.981.695	APBD
	d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 441.104.759	APBD
2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 25.000.000.000	APBD
	a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 25.000.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 26.061.212.579	

Binjai. Januari 2024

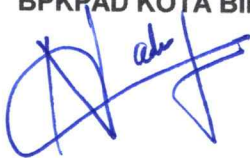
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KOTA BINJAI



NADRATUL FIRDA, SH
NIP. 19820518 200502 2 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROY CHANDRA KUSUMAH, ST**
Jabatan : Kasubbid Belanja Tidak Langsung

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NADRATUL FIRDA. SH**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai

NADRATUL FIRDA. SH
NIP. 19820518 200502 2 004

Pihak Pertama
Kasubbid Belanja Tidak Langsung

ROY CHANDRA KUSUMAH, ST
NIP. 19791109 201003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP
		Persentase SILPA terhadap APBD	0,0160 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 131.625.085,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 130.501.040,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 357.981.695,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 441.104.759,00	APBD
Jumlah Keseluruhan		Rp. 1.061.212.579,00	

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KOTA BINJAI



NADRATUL FIRDA. SH
NIP. 19820518 200502 2 004

KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG



ROY CHANDRA KUSUMAH, ST
NIP. 19791109 201003 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN ,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA
BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SATRIA YUDHA ATMAJA, SE**
Jabatan : Kasubbid Belanja Langsung

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NADRATUL FIRDA. SH**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai

NADRATUL FIRDA. SH
NIP. 19820518 200502 2 004

Pihak Pertama
Kasubbid Belanja Langsung

SATRIA YUDHA ATMAJA, SE
NIP. 19850425 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP
		Persentase SILPA terhadap APBD	0,0160 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 131.625.085,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 130.501.040,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 357.981.695,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 441.104.759,00	APBD
Jumlah Keseluruhan		Rp. 1.061.212.579,00	

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KOTA BINJAI



NADRATUL FIRDA. SH
NIP. 19820518 200502 2 004

Kasubbid Belanja Langsung



SATRIA YUDHA ATMAJA, SE
NIP.19850425 201001 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **POPPY DIAN ARIANI SIREGAR,SH**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat/Daerah Muda**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NADRATUL FIRDA. SH**
Jabatan : **Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai

NADRATUL FIRDA. SH
NIP. 19820518 200502 2 004

Pihak Pertama
Analisis Keuangan Pusat/Daerah Muda

POPPY DIAN ARIANI SIREGAR,SH
NIP.19830126 201101 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP
		Persentase SILPA terhadap APBD	0,0160 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 131.625.085,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 130.501.040,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 357.981.695,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 441.104.759,00	APBD
	Jumlah Keseluruhan	Rp.1.061.212.579,00	

KEPALA BIDANG ANGGARAN
BPKPAD KOTA BINJAI



NADRATUL FIRDA. SH
NIP. 19820518 200502 2 004

Binjai, Januari 2024

Analisis Keuangan Pusat/Daerah Muda



POPPY DIAN ARIANI SIREGAR,SH
NIP.19830126 201101 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, S.E, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai**

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

**Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai**

BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, S.E, M.Si
NIP. 19801015 200502 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	90%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	601.288.620	APBD
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp	121.800.670	APBD
	Koodinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp	307.272.000	APBD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	Rp	70.525.950	APBD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	101.690.000	APBD
	Jumlah	Rp	601.288.620	

Binjai, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BPKPAD KOTA BINJAI



BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, SE, M.Si.
NIP. 19801015 200502 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANUGERAH ALEXANDER, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, S.E, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan an Aset Daerah Kota Binjai

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Belanja Langsung Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, S.E, M.Si
NIP. 19801015 200502 1 001

ANUGERAH ALEXANDER, SE
NIP. 19801015 200502 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	90%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	200.429.540	APBD
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp	40.600.223	APBD
	Koodinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp	102.424.000	APBD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D	Rp	23.508.650	APBD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	33.896.667	APBD
	Jumlah	Rp	200.429.540	

Binjai, Januari 2024

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BPKPAD KOTA BINJAI



BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, SE, M.Si.
NIP. 19801015 200502 1 001

KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
BELANJA LANGSUNG BKPKAD KOTA BINJAI



ANUGERAH ALEXANDER, SE
NIP. 19860329 201001 1 015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHAIRIDA, S.E**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, S.E, M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, S.E, M.Si
NIP. 19801015 200502 1 001

KHAIRIDA, S.E
NIP. 19850806 200502 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	90%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 200.429.540	APBD
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 40.600.223	APBD
	Koodinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 102.424.000	APBD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	Rp 23.508.650	APBD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 33.896.667	APBD
	Jumlah	Rp 200.429.540	

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BPKPAD KOTA BINJAI



BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, SE, M.Si.
NIP. 19801015 200502 1 001

Binjai, Januari 2024

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA
BPKPAD KOTA BINJAI



KHAIRIDA, SE
NIP. 19850806 200502 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JURIAH**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, S.E, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan an Aset Daerah Kota Binjai

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, S.E, M.Si
NIP. 19801015 200502 1 001

JURIAH
NIP. 19720417 199303 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	90%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	200.429.540	APBD
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp	40.600.223	APBD
	Koodinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp	102.424.000	APBD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	Rp	23.508.650	APBD
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	33.896.667	APBD
	Jumlah	Rp	200.429.540	

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BPKPAD KOTA BINJAI



BONA MANUEL TARIGAN SIBERO, SE, M.Si.
NIP. 19801015 200502 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG BKPKAD KOTA BINJAI


JURIAH

NIP. 19720417 199303 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WANDA RISWAHYUDI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai**

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

**Pihak Pertama,
Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai**

WANDA RISWAHYUDI, SE
NIP. 19830102 200804 1 001

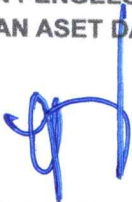
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase tata kelola pemerintahan yang berkualitas	WTP
		Persentase SILPA terhadap APBD	0,016 %
		Opini BPK	WTP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
2	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 799.299.954	APBD
	Koordinasi penyusunan laporan		
	a. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Rp 232.288.170	APBD
	b. Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Rp 295.894.514	APBD
	c. Pembinaan akutansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 271.117.270	APBD
	Jumlah	Rp 799.299.954	

Binjai, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKPAD KOTA BINJAI



WANDA RISWAHYUDI, SE
NIP. 19830102 200804 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUNITA HARIANI MANALU,SE.**
Jabatan : Kepala Subbidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **WANDA RISWAHYUDI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

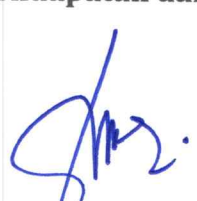
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai


WANDA RISWAHYUDI, S.E.
NIP. 19830102 200804 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Subbidang Pelaporan
Pendapatan dan Belanja


JUNITA HARIANI MANALU,SE.
NIP. 19860612 201503 2 002

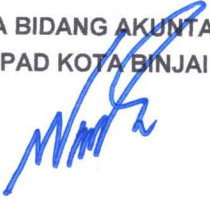
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	0,0160%
		SILPA terhadap APBD Opini BPK	WTP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 271.117.270	APBD
	Jumlah	Rp 271.117.270	

Binjai , Januari 2024

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKPAD KOTA BINJAI



WANDA RISWAHYUDI, S.E
NIP. 19830102 200804 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN
PENDAPATAN DAN BELANJA



JUNITA HARIANI MANALU, S.E.
NIP. 19860612 201503 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASMAR NASUTION, SE.**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda**

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **WANDA RISWAHYUDI, S.E.**
Jabatan : **Kepala Bidang Akuntansi**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai**

**WANDA RISWAHYUDI, S.E.
NIP. 19830102 200804 1 001**

**Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Muda**

**HASMAR NASUTION, SE.
NIP. 19781024 200903 1 001**

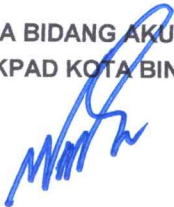
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	0,0160%
		SILPA terhadap APBD Opini BPK	WTP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 199.997.360	APBD
	Jumlah	Rp 199.997.360	

Binjai , Januari 2024

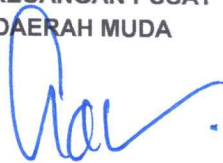
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKPAD KOTA BINJAI



WANDA RISWAHYUDI, S.E
NIP. 19830102 200804 1 001

Binjai, Januari 2024

ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH MUDA



HASMAR NASUTION, SE
NIP. 19781024 200903 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FORTUNA PANCA SURIYANTI PUTRI, SE.**
Jabatan : Kepala Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **WANDA RISWAHYUDI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

WANDA RISWAHYUDI, S.E.
NIP. 19830102 200804 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Subbidang Akuntansi
Pendapatan dan Belanja

FORTUNA PANCA SURIYANTI PUTRI, SE.
NIP. 19850415 201101 2 009

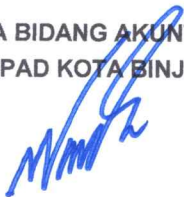
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	0,0160%
		SILPA terhadap APBD Opini BPK	WTP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 295.894.514	APBD
	Jumlah	Rp 295.894.514	

Binjai , Januari 2024

KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BPKPAD KOTA BINJAI



WANDA RISWAHYUDI, S.E
NIP. 19830102 200804 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI
PENDAPATAN DAN BELANJA



FORTUNA PANCA SURIYANTI PUTRI, SE
NIP. 19850415 201101 2 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELFITRA HARIADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Retribusi dan Pajak
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

ELFITRA HARIADI, S.E.
NIP. 19800424 200701 1 004

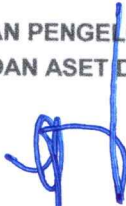
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	19,50%
		Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.499.999.027	APBD
a	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 231.440.124	APBD
b	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 565.149.788	APBD
c	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Rp 182.618.410	APBD
d	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 481.021.200	APBD
e	Penagihan Pajak Daerah	Rp 483.047.155	APBD
f	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 556.722.350	APBD
	Jumlah	Rp 2.499.999.027	

Binjai , Januari 2024

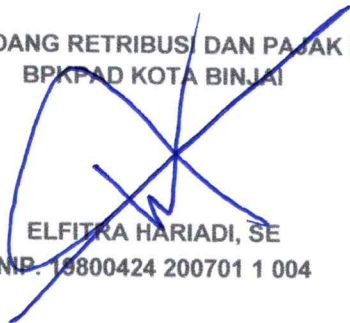
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
BPKPAD KOTA BINJAI



ELFITRA HARIADI, SE
NIP. 19800424 200701 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRI ULYANI NASUTION, S.Sos.**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda**

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **ELFITRA HARIADI, S.E.**
Jabatan : **Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Retribusi dan Pajak
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

ELFITRA HARIADI, S.E.
NIP. 19800424 200701 1 004

Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat
Dan Daerah Muda

FITRI ULYANI NASUTION, S.Sos.
NIP. 19761029 199703 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	19,50%
		Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
c.	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Rp 182.618.410	APBD
d.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 481.021.200	APBD
	Jumlah	Rp 663.639.610	

Binjai , Januari 2024

KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
BPKPAD KOTA BINJAI

ELFITRA HARIADI, S.E
NIP. 19800424 200701 1 004

Binjai, Januari 2024

ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH MUDA

FITRI ULYANI NASUTION, S.Sos.
NIP. 19761029 199703 2 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROLAND HALOMOAN PANJAITAN, S.E.**
Jabatan : Kepala Subbidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ELFITRA HARIADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

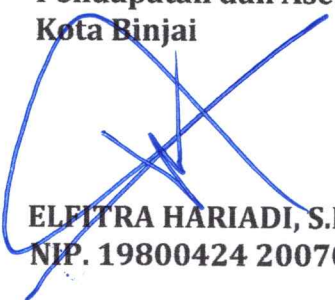
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Retribusi dan Pajak
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai


ELFITRA HARIADI, S.E.
NIP. 19800424 200701 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Subbidang Pengendalian
Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya


ROLAND HALOMOAN PANJAITAN, S.E.
NIP. 19861224 201506 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	19,50%
		Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 231.440.124	APBD
b	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 556.722.350	APBD
	Jumlah	Rp 788.162.474	

Binjai , Januari 2024

KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
BPKPAD KOTA BINJAI

ELFITRA HARIADI, S.E
NIP. 19800424 200701 1 004

Binjai, Januari 2024

KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN
RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH LAINNYA

ROLAND HALOMOAN PANJAITAN, S.E.
NIP. 19861224 201506 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEAR VENTI AKHIRINA TARIGAN, A.Md.**
Jabatan : Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **ELFITRA HARIADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Retribusi dan Pajak
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

Pihak Pertama,
Kepala Subbidang Penetapan
Pajak Daerah Lainnya

ELFITRA HARIADI, S.E.
NIP. 19800424 200701 1 004

DEAR VENTI AKHIRINA TARIGAN, A.Md
NIP. 19780214 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	19,50%
		Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
e.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 565.149.788	APBD
f.	Penagihan Pajak Daerah	Rp 483.047.155	APBD
	Jumlah	Rp 1.048.196.943	

Binjai , Januari 2024

KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH
BPKPAD KOTA BINJAI

ELFITRA HARIADI, S.E
NIP. 19800424 200701 1 004

Binjai, Januari 2024

KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN
RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH LAINNYA

DEAR VENTI AKHIRINA TARIGAN, A.Md
NIP. 19780214 200604 2 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI ANTORIO GINTING, S.H.**
Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PBB dan PBHTB
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai

ANDI ANTORIO GINTING, S.H.
NIP. 19820330 200801 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.299.993.744	APBD
a	Penilaian Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan (BPHTB)	Rp 944.874.515	APBD
b.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 940.892.639	APBD
c.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 414.226.590	APBD
	Jumlah	Rp 2.299.993.744	

Binjai, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PBB dan BPHTB
BPKPAD KOTA BINJAI



ANDI ANTORIO GINTING, S.H.
NIP. 19820330 200801 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NATALIA DESIDA Br. GINTING, SH**
Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ANDI ANTORIO GINTING, S.H**
Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kota Binjai**

ANDI ANTORIO GINTING, S.H
NIP. 19820330 200801 1 002

**Pihak Pertama,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**

NATALIA DESIDA Br. GINTING, SH
NIP. 19711219 200212 2 001

PERJANJIAN KINEJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah		
a	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 944.874.515	APBD

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB
BPKPAD KOTA BINJAI



ANDI ANTORIO GINTING, S.H
NIP. 19820330 200801 1 002

Binjai, Januari 2024

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH BPKPAD KOTA BINJAI



NATALIA DESIDA Br. GINTING
NIP. 19711219 200212 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TIGOR SIHOTANG, S.Sos**

Jabatan : Kasubbid Penetapan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ANDI ANTORIO GINTING, S.H**

Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kota Binjai**

**ANDI ANTORIO GINTING, S.H
NIP. 19820330 200801 1 002**

**Pihak Pertama,
Kasubbid Penetapan PBB dan BPHTB
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**

**TIGOR SIHOTANG, S.Sos
NIP. 19711219 200212 2 001**

PERJANJIAN KINEJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah		
	a Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 414.226.590	APBD

Binjai, Januari 2024

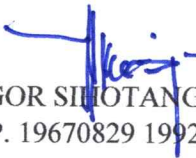
KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB
BPKPAD KOTA BINJAI



ANDI ANTORIO GINTING, S.H
NIP. 19820330 200801 1 002

Binjai, Januari 2024

KASUBBID PENETAPAN PBB
DAN BPHTB BPKPAD KOTA BINJAI



TIGOR SIHOTANG, S.Sos
NIP. 19670829 199203 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENATA MAYWANTO SIREGAR, ST**
Jabatan : Kasubbid Pelayanan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **ANDI ANTORIO GINTING, S.H**
Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kota Binjai**

ANDI ANTORIO GINTING, S.H
NIP. 19820330 200801 1 002

**Pihak Pertama,
Kasubbid Pelayanan PBB dan BPHTB
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai**

RENATA MAYWANTO SIREGAR, ST
NIP. 19890501 201503 1 003

PERJANJIAN KINEJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	5,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah		
	a Pelayan dan Konsultasi Pajak daerah	Rp. 940.892.639	APBD

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB
BPKPAD KOTA BINJAI



ANDI ANTORIO GINTING, S.H
NIP. 19820330 200801 1 002

Binjai, Januari 2024

KASUBBID PELAYANAN PBB DAN
BPHTB BPKPAD KOTA BINJAI



RENATA MAYWANTO SIREGAR, ST
NIP. 19890501 201503 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UMRIZAL GINTING, S.E, M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : **ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kota Binjai

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Binjai

UMRIZAL GINTING, S.E, M.M.
NIP. 19830215 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	4,00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	749.998.848	
	a. Penyusunan standart harga	Rp	219.999.769	APBD
	b. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	174.999.830	
	b. Penilaian barang milik daerah	Rp	49.999.818	APBD
	c Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	69.999.878	APBD
	d Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Rp	49.999.970	APBD
	e Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	134.999.733	APBD
	f Pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	49.999.850	APBD
	Jumlah	Rp	749.998.848	APBD

Binjai, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

ERWIN TOGA T.P. PURBA, S.Sos, M.SP.
NIP. 19681210 198910 1 001

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BPKPAD KOTA BINJAI

UMRIZAL GINTING, SE,M.M
NIP. 19830215 200903 1 004

PERNYATAAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAHYA AL HABIBI, A. Md**
Jabatan : Kasubbid Optimalisasi Aset pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **UMRIZAL GINTING, S.E, M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan dan Aset Daerah
Kota Binjai

UMRIZAL GINTING, S.E, M.M.
NIP. 19830215 200903 1 004

Pihak Pertama,
Kasubbid Optimalisasi Aset

YAHYA AL HABIBI, A. Md
NIP. 19791106 200804 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	4.00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	99,999,788	
	a. Penilaian barang milik daerah	Rp	49,999,818	APBD
	b. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Rp	49,999,970	APBD
	Jumlah	Rp	99,999,788	APBD

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BPKPAD KOTA BINJAI



UMRIZAL GINTING, SE. MM
NIP. 19830215 200903 1 004

Binjai, Januari 2024

KASUBBID OPTIMALISASI ASET
BPKPAD KOTA BINJAI



YAHYA AL HABIBI, A.Md
NIP. 19791106 200804 1 001

**PERNYATAAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMRON, ST. MMPP**
Jabatan : Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **UMRIZAL GINTING, S.E, M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan dan Aset Daerah
Kota Binjai**

**UMRIZAL GINTING, S.E, M.M.
NIP. 19830215 200903 1 004**

**Pihak Pertama,
Penilai Pemerintah Ahli Muda**


**IMRON, ST. MMPP
NIP. 19791109 201101 1 001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	4.00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	339,999,497	
	a, Penyusunan standart harga	Rp	219,999,769	APBD
	b. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	69,999,878	APBD
	c. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	49,999,850	APBD
	Jumlah	Rp	339,999,497	APBD

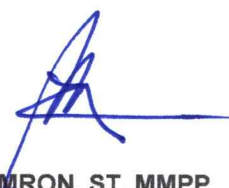
Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BPKPAD KOTA BINJAI


UMRIZAL GINTING, SE. MM
NIP. 19830215 200903 1 004

Binjai, Januari 2024

PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA
BPKPAD KOTA BINJAI


IMRON, ST. MMPP
NIP. 19761109 201101 1 001

PERNYATAAN
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARI YUNI, SH**
Jabatan : Kasubbid Pendataan Aset pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

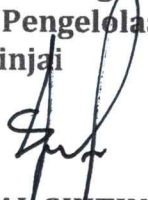
Nama : **UMRIZAL GINTING, S.E, M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan dan Aset Daerah
Kota Binjai


UMRIZAL GINTING, S.E, M.M.
NIP. 19830215 200903 1 004

Pihak Pertama,
Kasubbid Pendataan Aset


SARI YUNI, SH
NIP. 19810601 201406 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi pemanfaatan asset terhadap PAD	4.00%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	309,999,563	
	a. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	174,999,830	APBD
	b. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	134,999,733	APBD
	Jumlah	Rp	309,999,563	APBD

Binjai, Januari 2024

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET
DAERAH BPKPAD KOTA BINJAI


UMRIZAL GINTING, SE. MM
NIP. 19830215 200903 1 004

Binjai, Januari 2024

KASUBBID PENDATAAN ASET
BPKPAD KOTA BINJAI


SARI YUNI, SH
NIP. 19810601 201406 2 007